

LITERASI MEDIA: MENGENAL MODUS TPPO DAN PENCEGAHAN DI SMK 2 KOTA TANJUNGPINANG

**Jamhur Poti¹, Bismar Arianto²,
Intan Idiani^{3*}, Euis Ammelia⁴,
Reza Gemilang⁵**

^{1), 3)} Kajian Film, Televisi dan Media,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

²⁾ Ilmu Pemerintahan, Universitas
Maritim Raja Ali Haji

⁴⁾ Ilmu Hubungan Internasional,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

⁵⁾ Ilmu Administrasi Negara,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Article history

Received : 8 Oktober 2025

Revised : 10 Oktober 2025

Accepted : 29 Desember 2025

*Corresponding author

Intan Idiani

intanidiani@umrah.ac.id

Abstrak

Dalam era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan maraknya penyalahgunaan media sosial, literasi media menjadi krusial, terutama bagi generasi muda yang rentan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kondisi ini diperparah karena Kepulauan Riau (Kepri) yang telah diidentifikasi sebagai salah satu "pintu masuk-pintu keluar" utama TPPO di Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kritis siswa SMK terhadap modus TPPO yang memanfaatkan teknologi digital dan sektor pariwisata. Mitra pengabdian dalam kegiatan ini adalah SMK Negeri 2 Kota Tanjungpinang, sebuah sekolah kejuruan yang siswanya berada dalam kelompok usia produktif dan rentan terhadap tawaran kerja palsu di media digital. Metode pelaksanaan kegiatan adalah penyuluhan dan sosialisasi yang bersifat partisipatif dan interaktif, meliputi ceramah, sesi tanya jawab, studi kasus, dan simulasi, dengan menghadirkan narasumber ahli dari Kejaksaan Negeri Bintan dan akademisi. Hasil PkM menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan pada siswa dibandingkan Asesmen Awal dan *pretest*, di mana mayoritas peserta kini mampu mengidentifikasi tanda-tanda penipuan daring dan indikator TPPO, membuktikan efektivitas program dalam membentuk kesadaran kritis yang dibutuhkan di era digital.

Kata Kunci: Literasi Media; TPPO; Pencegahan Kejahatan; Media Digital; Tanjungpinang

Abstract

In the digital age, characterized by technological progress and widespread misuse of social media, media literacy has become essential, especially for youth who are vulnerable to Trafficking in Persons (TIP/TPPO). This issue is worsened in the Riau Islands (Kepri), identified as one of Indonesia's main "entry-exit points" for TIP cases. As a result, this Community Service (PKM) project aimed to improve students' knowledge and critical awareness of TIP schemes that utilize digital technology and the tourism industry. The partnering institution was SMK Negeri 2 Kota Tanjungpinang, a vocational school whose students are in the productive age range and at risk of falling for fake job offers online. The method used involved participatory and interactive outreach, including lectures, Q&A sessions, case studies, and simulations, with expert speakers from the Bintan District Attorney's Office and academics. The PKM results showed a notable increase in students' understanding compared to their initial assessment, with most participants now able to recognize signs of online fraud and TIP indicators, demonstrating the program's success in building necessary digital critical awareness age.

Keywords: Media Literacy; TPPO; Crime Prevention; Digital Media; Tanjungpinang

Copyright © 2026 by Author, Published by Dharmawangsa University
Community Service Institution

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, literasi media menjadi semakin krusial, terutama bagi generasi muda yang rentan terhadap berbagai pengaruh negatif Media sosial, sebagai salah satu pilar utama kemajuan teknologi, memiliki dampak positif yang signifikan dalam memfasilitasi komunikasi dan penyebaran informasi (Guruh et al., 2020). Namun, di balik manfaatnya, tersimpan potensi penyalahgunaan yang dapat mengancam individu dan masyarakat, terutama dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang (Sari et al., 2024). Ironisnya, dampak negatif media sosial seringkali luput dari

perhatian, padahal implikasinya sangat merugikan, salah satunya adalah penyebaran berita bohong atau hoaks. Informasi hoaks dapat memicu keresahan, konflik, dan perpecahan, terutama jika isu-isu sensitif seperti politik menjadi sasarannya.

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan transnasional terorganisir yang menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia, khususnya di kalangan generasi muda yang rentan terhadap eksploitasi (Hadjira et al., 2023). Upaya pencegahan TPPO memerlukan strategi komprehensif yang menasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki karakteristik unik dan potensi kerentanan tersendiri (Ibad & Juli Nurani, 2023).

Kemajuan teknologi dan komunikasi, termasuk media sosial, menawarkan peluang sekaligus tantangan (Guruh et al., 2020). Di satu sisi, mereka memfasilitasi penyebaran informasi dan kesadaran tentang TPPO, tetapi di sisi lain, mereka juga dapat dieksploitasi oleh pelaku TPPO untuk merekrut korban, menyebarkan propaganda, dan melakukan transaksi ilegal. Tingkat literasi teknologi masyarakat Indonesia secara umum masih rendah, yang memicu kerentanan terhadap penyebaran informasi palsu dan tindakan kejahatan seperti penipuan dan eksploitasi (Sutirman et al., 2022).

Kondisi ini diperparah dengan maraknya kasus penjualan manusia atau **human trafficking** yang kerap terjadi di Indonesia, seringkali melibatkan korban dengan tingkat pendidikan rendah dan kemiskinan sebagai faktor pendorong (Muhammad, 2021). Hal ini didukung oleh fakta bahwa perkembangan teknologi telah membuka peluang bagi berbagai kejahatan baru yang muncul dari dunia digital, termasuk di antaranya kejahatan siber dan penipuan online yang menjadi modus operandi umum dalam perdagangan orang (Harmoko, 2021). Ditambah kasus dalam ranah digital, di mana pelaku dapat menyembunyikan identitas dan niat sebenarnya, bahkan mengeksploitasi korban tanpa harus bertemu langsung pada awalnya. Oleh karena itu, tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial menjadi area krusial yang memerlukan perhatian mendalam dari perspektif kriminologi dan pencegahan. Sangat penting untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang cara menggunakan media digital secara bijak (Yulista, 2021).

Kondisi di Kepulauan Riau (Kepri) dan Tanjungpinang secara khusus menunjukkan urgensi yang tinggi dalam penanganan TPPO. Kepri telah diidentifikasi sebagai salah satu "pintu masuk-pintu masuk" utama kasus TPPO di Indonesia (Tria Sytrisna & Ihsanuddin, 2024). Data menunjukkan peningkatan kasus yang signifikan di wilayah ini. Pada tahun 2023, Polda Kepri berhasil mengamankan 102 tersangka TPPO, sebuah peningkatan drastis dari 22 tersangka pada tahun 2022. Jumlah kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural juga melonjak dari 71 kasus pada 2022 menjadi 114 kasus pada 2023, dengan 448 korban berhasil diselamatkan pada 2023 (Apriyani, 2023). Data terbaru hingga Juli 2024 menunjukkan Kepri masih menjadi wilayah dengan korban TPPO terbanyak secara nasional, mencapai 140 orang (Tria Sytrisna & Ihsanuddin, 2024).

Konvergensi kerentanan demografis (remaja, perempuan) dengan kerentanan geografis (Kepri sebagai pintu masuk/keluar TPPO) menciptakan "titik panas" risiko yang akut di wilayah ini. Siswa SMK berada dalam rentang usia remaja dan seringkali mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan, menjadikan mereka target empuk bagi modus operandi terkait PMI non-prosedural yang marak di Kepri. Kondisi ini menegaskan bahwa program di SMK 2 Kota Tanjungpinang bukan sekadar inisiatif pendidikan umum, melainkan intervensi strategis yang sangat mendesak dan relevan secara lokal untuk melindungi kelompok yang paling berisiko di wilayah yang paling terdampak.

Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang untuk membekali siswa dengan kemampuan literasi media yang kuat sebagai benteng diri dari jebakan modus TPPO yang memanfaatkan teknologi digital dan sektor pariwisata/hospitality. Adapun kemampuan literasi ini mencakup identifikasi, verifikasi, dan evaluasi pesan terkait TPPO, yang esensial untuk membentengi kaum muda dari risiko eksploitasi (Andiyansari & Sukmawati, 2021). Program ini secara spesifik berupaya mengatasi tantangan yang muncul dari kemudahan konsumsi informasi di dunia digital, yang menuntut setiap individu untuk dapat memilah dan memilih informasi secara kritis guna mengantisipasi gelombang hoaks yang seringkali menjadi pintu masuk TPPO (Nurhaipah & Erdiyanti, 2020). Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pengenalan jenis-jenis TPPO, tetapi juga pada

pengembangan kecakapan kritis dalam memverifikasi informasi dan mengidentifikasi potensi ancaman daring yang sering disamarkan dalam bentuk penawaran menarik (Andiyansari & Sukmawati, 2021).

Dengan demikian, literasi digital dan media menjadi esensial tidak hanya untuk mengamankan diri dari ancaman langsung TPPO, tetapi juga untuk membentuk warga digital yang cerdas dan kritis (Dini Nisa & Setiyawati, 2019). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa literasi digital bukan hanya tentang kemampuan teknis, melainkan juga melibatkan aspek etika dan interaksi sosial di media digital. Oleh karena itu, pengajaran literasi digital harus mencakup pemahaman mendalam tentang konsekuensi penyebaran informasi palsu serta pentingnya verifikasi sumber sebelum mempercayai atau membagikan konten apa pun (Annisa Anastasia Salsabila et al., 2023).

SMK Negeri 2 Tanjungpinang yang berlokasi di Kecamatan Bukit Bestari memiliki jumlah siswa sebanyak 493 orang dengan 74 pendidik dan tenaga kependidikan (Dapodikbud, 2025). Permasalahan utama yang dihadapi mitra dalam hal ini siswa SMK Negeri 2 Tanjungpinang adalah rendahnya literasi digital dan literasi media yang membuat mereka rentan terhadap modus TPPO yang memanfaatkan ruang digital. Kerentanan ini diperkuat oleh kondisi lokal Kepulauan Riau (Kepri), yang merupakan salah satu wilayah dengan kasus TPPO tertinggi secara nasional. Data menunjukkan lonjakan signifikan: dari 22 tersangka pada 2022 menjadi 102 tersangka pada 2023, serta peningkatan kasus PMI Non-Prosedural dari 71 menjadi 114 kasus dalam periode yang sama. Hingga Juli 2024, Kepri menempati posisi tertinggi jumlah korban TPPO dengan 140 orang (Tria Sytrisna & Ihsanuddin, 2024).

Lingkungan sosial dan demografis siswa SMK juga menambah tingkat risiko. Siswa berusia remaja yang sedang mempersiapkan diri memasuki dunia kerja sering menjadi sasaran penipuan lowongan palsu, beasiswa fiktif, atau tawaran magang ilegal. Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar yang didominasi sektor jasa serta keterbatasan fasilitas literasi digital di sekolah semakin memperburuk situasi. Karena itu, prioritas program PKM ini ditetapkan pada peningkatan literasi media dan literasi digital untuk pencegahan TPPO. Prioritas ini dipilih karena sifatnya mendesak, relevan secara lokal, dan berdampak langsung terhadap perlindungan kelompok paling rentan.

Kerangka pemikiran program ini didasarkan pada teori literasi media dan literasi digital yang menekankan kemampuan individu untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan memproduksi informasi secara kritis (Dini Nisa & Setiyawati, 2019). Literasi media bukan hanya kemampuan teknis menggunakan perangkat digital, tetapi mencakup aspek etika, pemahaman konteks, serta kesadaran sosial dalam berinteraksi di ruang digital (Annisa Anastasia Salsabila et al., 2023).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital berkorelasi dengan tingginya kerentanan terhadap hoaks, penipuan, dan eksploitasi online (Sutirman et al., 2022). Dalam konteks TPPO, media sosial sering dimanfaatkan pelaku sebagai sarana perekrutan, penyamaran identitas, dan komunikasi untuk kejahatan terorganisasi (Harmoko, 2021). Oleh karena itu, pemilihan program edukasi literasi media menjadi sangat relevan untuk memutus mata rantai eksploitasi digital yang menyasar remaja.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa mengenai bentuk, modus, dan indikator TPPO yang sering berawal dari media sosial, sekaligus mengembangkan kecakapan literasi media seperti kemampuan mengidentifikasi, memverifikasi, dan mengevaluasi informasi digital secara kritis. Melalui peningkatan literasi ini, siswa diharapkan mampu membentuk perilaku digital yang lebih waspada dan bertanggung jawab sehingga dapat melindungi diri dari berbagai risiko penipuan dan eksploitasi online. Selain itu, program ini juga dirancang untuk memberikan rekomendasi bagi sekolah dalam memperkuat program literasi digital secara berkelanjutan sebagai upaya menghadapi meningkatnya kejahatan berbasis teknologi.

Manfaat program ini dirasakan oleh siswa, sekolah, dan masyarakat. Siswa memperoleh peningkatan kesadaran serta keterampilan praktis dalam menghadapi ancaman digital, sekolah mendapatkan strategi penguatan literasi media yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran, dan masyarakat memperoleh manfaat tidak langsung berupa pencegahan TPPO yang lebih efektif melalui meningkatnya ketahanan literasi digital generasi muda.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2025 di SMK Negeri 2 Kota Tanjungpinang. Kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan dan sosialisasi yang melibatkan siswa SMK Negeri 2 Kota Tanjungpinang kelas 12 dengan menghadirkan pemateri yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Bintan. Kegiatan dilaksanakan di Aula sekolah SMK Negeri 2 Kota Tanjungpinang.



Gambar 1 Foto Bersama

Kegiatan ini menggunakan pendekatan yang partisipatif dan interaktif, meliputi ceramah, sesi tanya jawab, studi kasus dan simulasi. Sebelum kegiatan dimulai para peserta diwajibkan mengikuti *PreTest* yang sudah disediakan oleh tim pengabdian. Kegiatan di buka oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Tanjungpinang yang diwakili oleh bagian Kesiswaan, kemudian sambutan dari Bapak Dr. Bismar Arianto, S. Sos., M. Si, yang mewakili kelompok pengabdian kepada masyarakat FISIP UMRAH. Sambutan yang di berikan oleh Bapak Bismar Arianto sekaligus menjadi assesmen awal para peserta, untuk menggali pemahaman awal peserta secara interaktif. Hasil asesment yang dilakukan, menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum mengerti apa itu TPPO dan juga modus-modus yang biasa di gunakan untuk menarik korbannya

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama secara mendalam terkait literasi media dan pengenalan modus-modus TPPO yang relevan dengan siswa SMK. Keistimewaan dari sesi ini adalah kehadiran narasumber ahli yaitu Bapak Rusmin, SH.,MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bintan, yang memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum terkait TPPO dan strategi pencegahan yang efektif. Kemudian pemaparan materi sesi kedua oleh Bapak Jamhur Poti, Phd., selaku dosen Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media yang ada di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Yang memaparkan terkait literasi media dan berpikir kritis, yang merupakan kemampuan untuk mengakses, mengelola, dan menggunakan informasi digital secara bijak, serta bersikap skeptis terhadap informasi yang belum terverifikasi. Dengan demikian, individu dapat lebih waspada dan tidak mudah menjadi korban dari hoaks atau penipuan yang menjadi pintu masuk bagi tindak TPPO. Materi yang disajikan melalui ceramah interaktif dan sesi tanya jawab untuk memastikan pemahaman yang optimal dari para peserta.

Setelah pemaparan materi dari narasumber kedua selesai, kegiatan dilanjutkan dengan Sesi Tanya Jawab yang berjalan sangat interaktif, sesi ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan dan mengklarifikasi poin-poin penting. Sesi ini juga dimanfaatkan sebagai Evaluasi Formatif Interaktif dengan cara narasumber memberikan serangkaian pertanyaan lisan tambahan yang lebih spesifik di akhir sesi tanya jawab untuk memastikan pemahaman kunci telah tersampaikan dengan baik, selain pertanyaan awal yang diberikan di awal kegiatan sebagai asesmen awal. Sebagai Evaluasi Sumatif Utama dan penutup rangkaian kegiatan, seluruh peserta diwajibkan mengikuti Tes Akhir (*Post-test*) menggunakan aplikasi Quizizz. Tujuan dilakukannya rangkaian evaluasi ini adalah untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta. Dengan membandingkan data hasil Tes Akhir (*Post-test*) dengan hasil *Pretest*. Dengan membandingkan skor Tes Akhir ini dengan data Asesmen Awal yang sudah kami kumpulkan, kami bisa

mendapatkan gambaran jelas tentang efektivitas program secara keseluruhan dalam meningkatkan literasi media dan kesadaran siswa terhadap isu TPPO.

HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi ini berhasil memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta mengenai keterkaitan antara moda kejahatan TPPO, peran teknologi digital, dan pentingnya literasi media dalam upaya pencegahan.

Test Awal

Sebelum memulai kegiatan peserta diminta untuk mengisi *pretest* untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta terhadap TPPO. Kemudian assesment awal dilaksanakan melalui sesi tanya jawab interaktif yang diselipkan dalam sambutan pembukaan oleh perwakilan tim PkM, Bapak Dr. Bismar Arianto, S. Sos., M. Si, dan dilanjutkan dengan pertanyaan lisan spesifik sebelum pemaparan materi inti. Hasil dari asesmen ini secara kualitatif mengindikasikan tingkat pemahaman awal peserta yang masih terbatas. Hasil ini menegaskan urgensi dilaksanakannya program PkM, mengingat siswa SMK berada dalam kelompok usia produktif dan rentan terhadap tawaran kerja palsu melalui media digital, terutama di Kepulauan Riau yang merupakan "pintu masuk-pintu keluar" utama kasus TPPO di Indonesia.



Gambar 2 Sambutan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

Pemaparan Materi Literasi media dan TPPO

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama terkait literasi media dan pengenalan modus-modus TPPO yang relevan dengan siswa SMK. Keistimewaan dari sesi ini adalah kehadiran narasumber ahli yaitu Bapak Rusmin, SH.,MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bintan, yang memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum terkait TPPO dan strategi pencegahan yang efektif.



Gambar 3. Pemaparan oleh Bapak Rusmin, SH.,MH

Materi yang disampaikan oleh Bapak Rusmin, SH., MH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bintan, memberikan wawasan mendalam mengenai aspek hukum TPPO. Beliau menekankan bahwa modus operandi TPPO semakin beragam, mulai dari lowongan kerja palsu, penipuan beasiswa, hingga eksploitasi melalui hubungan daring yang tampak seperti pertemanan atau asmara. Materi ini membuka wawasan siswa bahwa TPPO tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga dapat dimulai dari interaksi sederhana di media sosial. Materi paparan mengungkap bahwa kasus TPPO di Indonesia meningkat dari 22 kasus (2022) menjadi 43 kasus (2024). Siswa diperkenalkan dengan indikator terjadinya TPPO seperti kerja paksa, pembatasan kebebasan, hingga ancaman kekerasan.

Selain itu, modus operandi seperti perekrutan pekerja migran ilegal, prostitusi paksa, perkawinan anak, hingga eksploitasi melalui teknologi informasi dibahas secara rinci. Siswa juga mempelajari dasar hukum dalam UU No. 21 Tahun 2007, termasuk pasal-pasal yang mengatur perbuatan, cara, dan tujuan TPPO. Pentingnya bukti elektronik, perlindungan saksi, dan kerahasiaan identitas korban dalam proses hukum turut disampaikan. Narasumber juga menyoroti kendala pembuktian seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan ketidakmauan korban melapor.



Gambar 4 Pemaparan Materi Bapak Jamhur Poti, Phd

Kemudian pemaparan materi sesi kedua oleh Bapak Jamhur Poti, Phd., selaku dosen Program Studi Kajian Film, Televisi dan Media yang ada di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Yang memaparkan terkait literasi media dan berpikir kritis, yang merupakan kemampuan untuk mengakses, mengelola, dan menggunakan informasi digital secara bijak, serta bersikap skeptis terhadap informasi yang belum terverifikasi. Dengan demikian, individu dapat lebih waspada dan tidak mudah menjadi korban dari hoaks atau penipuan yang menjadi pintu masuk bagi tindak TPPO.

Materi yang disampaikan menunjukkan bahwa TPPO dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan serius dengan korban yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Kepulauan Riau yang tercatat sebagai daerah dengan kasus tertinggi di Indonesia. Melalui pemaparan yang komprehensif, peserta diberikan wawasan mengenai modus TPPO yang kini semakin canggih. Para pelaku memanfaatkan platform media sosial untuk melakukan penipuan, perekrutan tenaga kerja ilegal, hingga manipulasi psikologis terhadap calon korban. Fakta ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital membawa dampak ganda: di satu sisi memudahkan komunikasi, namun di sisi lain membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi korban dengan cara yang sulit terdeteksi.

Penyuluhan ini juga menekankan pentingnya budaya bermedia sosial yang sehat dan etis. Peserta diajak memahami langkah-langkah dasar dalam menggunakan media sosial secara benar, mulai dari mengenali platform yang digunakan, mengelola informasi pribadi, hingga menerapkan etika berinteraksi secara daring. Materi tentang netiquette atau etika bermedia sosial dipaparkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran privasi, penyebaran informasi palsu, dan perilaku negatif lainnya yang dapat merugikan individu maupun masyarakat luas.

Salah satu aspek terpenting dalam kegiatan ini adalah pencegahan hoaks dan informasi menyesatkan. Peserta dibekali keterampilan untuk mengevaluasi kredibilitas informasi, menggunakan logika dan sumber resmi, memeriksa fakta, serta menyebarkan informasi yang valid di ruang digital. Upaya ini sejalan dengan program Tular Nalar dan Mafindo yang selama ini konsisten memerangi hoaks dan membangun literasi digital dan media di Indonesia.

Materi yang dipaparkan oleh narasumber kedua memaparkan data terkini yang menunjukkan bahwa Kepulauan Riau merupakan wilayah dengan kasus TPPO tertinggi di Indonesia pada tahun 2024, diikuti Kalimantan Utara. Fakta ini menggugah kesadaran peserta bahwa lingkungan tempat mereka tinggal memiliki kerentanan yang nyata terhadap kejahatan semacam ini. Peserta diajak untuk memahami berbagai modus TPPO, mulai dari penipuan lowongan kerja palsu, iming-iming beasiswa, hingga eksploitasi melalui hubungan daring yang dimulai dengan bujuk rayu psikologis. Materi yang disajikan melalui ceramah interaktif dan sesi tanya jawab untuk memastikan pemahaman yang optimal dari para peserta.

Selain itu, pemaparan tentang budaya media sosial memberikan wawasan baru bagi peserta mengenai bagaimana informasi yang beredar di dunia digital dapat memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang. Media sosial yang memiliki sifat terbuka, interaktif, dan cepat menyebarkan informasi sering kali menjadi ladang subur bagi penyebaran hoaks dan manipulasi informasi. Narasumber menekankan bahwa literasi digital bukan hanya tentang kemampuan mengakses teknologi, tetapi juga keterampilan untuk memilah informasi, mengevaluasi kebenaran data, dan menggunakannya secara etis serta bertanggung jawab.

Salah satu bagian penting dalam kegiatan ini adalah pembahasan mengenai etika bermedia sosial atau netiquette. Peserta diperkenalkan pada prinsip-prinsip dasar berinteraksi di dunia maya, seperti tidak menyebarkan informasi pribadi sembarangan, tidak memposting ujaran kebencian, serta memastikan setiap informasi yang dibagikan telah melalui proses verifikasi. Diskusi interaktif yang dilakukan memunculkan berbagai pertanyaan kritis dari siswa, mulai dari cara melaporkan akun mencurigakan, mengidentifikasi berita palsu, hingga langkah-langkah hukum jika menemukan indikasi TPPO di lingkungan sekitar.

Lebih lanjut, sesi tentang pencegahan hoaks mengajarkan peserta untuk selalu merujuk pada sumber resmi, menggunakan logika dan sains dalam menilai informasi, serta menghindari penyebaran konten yang meragukan. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun kebiasaan berpikir kritis di kalangan siswa, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.

Sesi Tanya Jawab Interaktif

Setelah seluruh materi disampaikan oleh kedua narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif. Pada sesi ini, terlihat antusiasme yang tinggi dari para peserta, khususnya siswa SMK Negeri 2 Tanjungpinang, dalam mengajukan berbagai pertanyaan seputar isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan literasi media. Pertanyaan yang diajukan oleh peserta umumnya berfokus pada bentuk-bentuk kasus TPPO yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar mereka, langkah-langkah pencegahan agar tidak menjadi korban, serta peran individu dalam mendeteksi modus kejahatan berbasis daring.



Gambar 5 Sesi Tanya Jawab

Antusiasme peserta ini menunjukkan adanya tingkat keingintahuan yang tinggi dan kesadaran awal terhadap pentingnya isu TPPO dalam kehidupan mereka, terutama karena sebagian besar peserta akan terjun ke dunia kerja, khususnya di sektor pariwisata dan perhotelan yang rentan terhadap praktik eksploitasi tenaga kerja. Sebagai bagian dari evaluasi pasca-pemaparan, narasumber juga memberikan beberapa pertanyaan lisan kepada peserta untuk menilai tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta mampu menjawab pertanyaan dengan benar dan percaya diri, yang menandakan bahwa mereka memahami substansi materi dengan baik.



Gambar 6 Peserta menjawab pertanyaan Narasumber

Keterlibatan aktif peserta dalam sesi ini menjadi indikator keberhasilan kegiatan, karena menunjukkan bahwa metode penyampaian materi dan interaksi dua arah antara pemateri dan peserta berjalan secara efektif. Selain itu, suasana tanya jawab yang terbuka juga memberikan ruang bagi siswa untuk mengaitkan pengetahuan yang diperoleh dengan realitas kehidupan mereka sehari-hari, sehingga meningkatkan relevansi dan daya guna kegiatan pengabdian ini.

Pelaksanaan dan Hasil Akhir

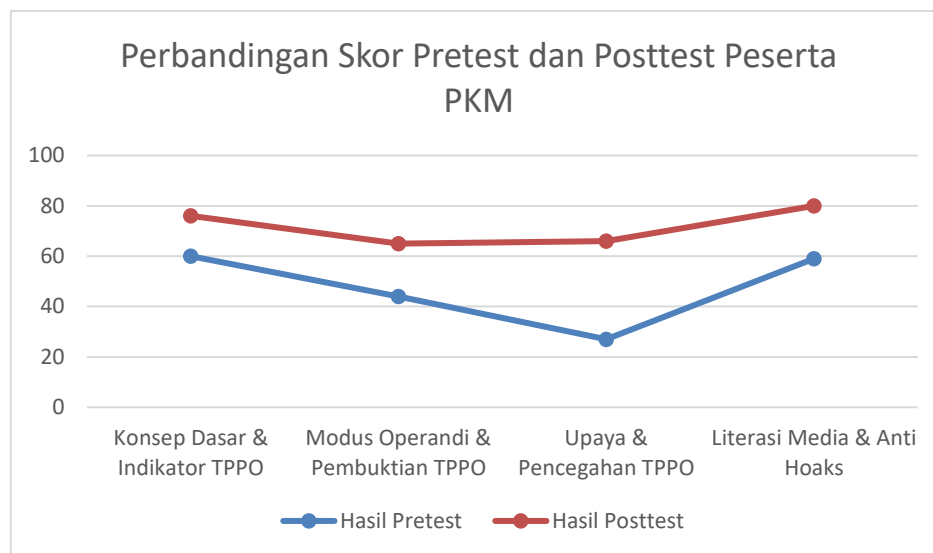
Setelah seluruh rangkaian kegiatan penyuluhan, pemaparan materi, dan sesi tanya jawab selesai dilaksanakan, peserta diberikan *posttest* sebagai instrumen evaluasi akhir. *Posttest* ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta literasi media setelah mengikuti kegiatan pengabdian ini. Instrumen *posttest* menggunakan bentuk dan jumlah soal yang sama dengan *pretest*, yaitu sebanyak 10 butir pertanyaan yang mencakup empat kategori utama: (1) Konsep Dasar dan Indikator TPPO, (2) Modus Operandi dan Pembuktian TPPO, (3) Upaya dan Pencegahan TPPO, serta (4) Literasi media dan Anti-Hoaks. Dengan format yang konsisten ini, perbandingan antara hasil *pretest* dan *posttest* dapat dilakukan secara objektif untuk menilai efektivitas kegiatan.

Evaluasi Kegiatan

Kegiatan sosialisasi ini berhasil memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta mengenai keterkaitan antara moda kejahatan TPPO, peran teknologi digital, dan pentingnya literasi media dalam upaya pencegahan. Hasil peningkatan skor *pretest-posttest* yang ada pada grafik dibawah mengkonfirmasi efektivitas kegiatan literasi media dalam meningkatkan wawasan siswa tentang TPPO. Berdasarkan hasil pengukuran melalui *pretest* dan *posttest*, terlihat adanya peningkatan signifikan pada tingkat pemahaman peserta terhadap materi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan literasi media. Grafik di atas menunjukkan perbandingan skor rata-rata *pretest* dan *posttest* pada empat kategori utama materi yang diberikan selama kegiatan.

Pada kategori Konsep Dasar dan Indikator TPPO, nilai rata-rata *pretest* peserta sebesar 60%, sedangkan pada *posttest* meningkat menjadi 76%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman sebesar 16%, yang mencerminkan bahwa peserta semakin memahami definisi, indikator, serta bentuk umum dari tindak pidana perdagangan orang setelah memperoleh pemaparan materi.

Kategori Modus Operandi dan Pembuktian TPPO mengalami peningkatan dari 44% pada *pretest* menjadi 65% pada *posttest*, atau meningkat sebesar 21%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa peserta mulai memahami berbagai modus kejahatan TPPO yang sering terjadi di masyarakat, serta mengetahui bentuk-bentuk pembuktian hukum yang relevan. Selanjutnya, pada kategori Upaya dan Pencegahan TPPO, peningkatan terjadi cukup signifikan, yaitu dari 27% pada *pretest* menjadi 66% pada *posttest*, atau meningkat sebesar 39%. Kenaikan yang paling tinggi pada kategori ini menegaskan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait langkah-langkah pencegahan dan upaya mitigasi terhadap potensi perdagangan orang, baik dalam konteks pribadi maupun lingkungan sosial.



Grafik 1 Perbandingan Skor *Pretest* dan *Posttest* Peserta PKM

Sementara itu, kategori Literasi Media dan Anti-Hoaks menunjukkan peningkatan dari 59% pada *pretest* menjadi 80% pada *posttest*, atau meningkat sebesar 21%. Peningkatan ini menggambarkan bahwa peserta semakin mampu mengidentifikasi informasi palsu (hoaks) serta memahami pentingnya keamanan digital dalam mencegah eksploitasi daring yang berkaitan dengan TPPO. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat pemahaman peserta meningkat dari 48% pada saat *pretest* menjadi 73% pada *posttest*. Berdasarkan indikator keberhasilan kegiatan yang ditetapkan (peningkatan minimal 20%), hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil melampaui target capaian. Peningkatan yang merata di semua kategori membuktikan bahwa metode penyampaian materi yang interaktif, keterlibatan narasumber ahli, serta sesi diskusi dan tanya jawab berjalan efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta terhadap isu TPPO dan literasi media.

Temuan ini konsisten dengan literatur sebelumnya. Andiyanisari & Sukmawati (2021) menemukan korelasi kuat antara tingkat literasi media dan pemahaman pesan TPPO; siswa dengan literasi media tinggi cenderung lebih mampu mengenali modus TPPO. Demikian pula, studi Sosialisasi Bahaya Media Sosial pada remaja di Jatinangor melaporkan bahwa setelah penerapan sosialisasi dan edukasi, pengetahuan peserta tentang modus perekrutan TPPO termasuk melalui media sosial, meningkat signifikan (Pratamawaty et al., 2021). Dengan kata lain, literasi media berperan sebagai proteksi kognitif yang meningkatkan kemampuan kritis siswa dalam mengidentifikasi jebakan TPPO. Oleh karena itu, peningkatan skor pasca-tes dalam kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa peserta berhasil “dibekali” dengan pengetahuan yang esensial, sesuai temuan Rachmawati et al. (2025) yang menyebutkan mayoritas siswa pasca-PKM mampu mengidentifikasi tanda-tanda penipuan daring dan indikator TPPO.

Kepulauan Riau adalah jalur pintu masuk dan pintu keluar utama TPPO nasional, sehingga siswa di wilayah ini sangat rentan terhadap tawaran kerja palsu dan eksploitasi. Seperti materi yang di berikan oleh Kepala Kejari Bintang misalnya menunjukkan bahwa posisi geografis perbatasan memfasilitasi praktik perdagangan orang dan diiringi literasi masyarakat yang rendah tentang risiko TPPO. Ketidaktahuan ini diperparah lemahnya

pengawasan dan minimnya pemberdayaan berbasis komunitas. Berangkat dari kenyataan tersebut, program literasi media semacam ini menjadi garda terdepan dalam menekan kerentanan tersebut, sebagaimana disimpulkan oleh Pratamawaty et al. (2021) bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis literasi adalah kunci pencegahan TPPO di daerah perbatasan.

Sejak awal, kegiatan ini dirancang agar mampu memberikan dampak nyata dalam dua dimensi: jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, peserta memperoleh pemahaman komprehensif tentang modus TPPO, etika bermedia sosial, serta keterampilan literasi digital yang relevan dengan tantangan era informasi. Dalam jangka panjang, diharapkan kegiatan ini mendorong terbentuknya budaya bermedia sosial yang sehat, meningkatnya kesadaran hukum di kalangan pelajar, serta keterampilan berpikir kritis dalam menyaring informasi digital.

Indikator keberhasilan kegiatan ini diukur melalui peningkatan pengetahuan peserta kegiatan terkait TPPO serta partisipasi aktif dalam diskusi. Seluruh indikator tersebut tercapai dengan baik, bahkan melebihi ekspektasi tim penyelenggara. Kegiatan ini memiliki keunggulan berupa materi yang aktual dan relevan dengan kondisi masyarakat Kepulauan Riau yang rawan kasus TPPO, metode pembelajaran partisipatif, serta kolaborasi antara perguruan tinggi, kejaksaan, dan pihak sekolah yang memperkuat legitimasi program. Dari sisi pelaksanaan, tantangan terbesar adalah tingkat heterogenitas pemahaman siswa mengenai dunia digital. Dengan demikian, kegiatan ini dinilai sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan yang rawan kasus TPPO, serta mampu memberikan nilai tambah berupa peningkatan kesadaran hukum, perubahan perilaku bermedia sosial, dan keterampilan berpikir kritis yang dibutuhkan di era digital.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) tentang Literasi Media dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di SMK Negeri 2 Kota Tanjungpinang telah mencapai keberhasilan signifikan dalam membekali siswa dengan pengetahuan dan kesadaran kritis. Berdasarkan perbandingan hasil Pretest dan Post-test, terdapat peningkatan pemahaman yang nyata, sebelumnya banyak siswa belum memahami sepenuhnya bentuk-bentuk TPPO dan modus operandi kejahatan tersebut di ranah daring, tetapi setelah kegiatan, mayoritas siswa mampu mengidentifikasi tanda-tanda penipuan daring dan memahami risiko eksploitasi. Keberhasilan ini didukung oleh materi yang sangat relevan dengan kondisi Kepulauan Riau yang rawan kasus TPPO, serta kolaborasi kuat antara akademisi, Kepala Kejaksaan Negeri Bintan, dan pihak sekolah.

Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan hambatan utama berupa tingkat heterogenitas pemahaman siswa mengenai dunia digital. Hambatan ini sekaligus membuka peluang perbaikan melalui peningkatan infrastruktur digital, pelatihan lanjutan, penyusunan modul pembelajaran literasi media, serta perluasan program ke sekolah-sekolah lain di wilayah rawan TPPO agar manfaat kegiatan dapat berkelanjutan dan berdampak lebih luas. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis tetapi juga mendorong terbentuknya perilaku kritis dan kesadaran hukum di kalangan siswa. Hambatan yang dihadapi diharapkan menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan program di masa mendatang.

PUSTAKA

- Andiyansari, P., & Sukmawati, A. I. (2021). Impacts Of Media Literacy Levels On Human Trafficking (Tppo) Content. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 14(2), 185–200. <https://doi.org/10.14421/pjk.v14i2.2059>
- Annisa Anastasia Salsabila, Dinie Anggraeni Dewi, & Rizky Saeful Hayat. (2023). Pentingnya Literasi di Era Digital dalam Menghadapi Hoaks di Media Sosial. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*, 3(1), 45–54. <https://doi.org/10.58192/insdun.v3i1.1775>
- Apriyani. (2023). *Sepanjang 2023 Sebanyak 102 Tersangka TPPO di Kepri Diamankan*. RRI. <https://www.rri.co.id/daerah-3t/496899/sepanjang-2023-sebanyak-102-tersangka-tppo-di-kepri-diamankan>

- Dapodikbud. (2025). Sekolah data kemendikdasmen. <https://Sekolah.Data.Kemendikdasmen.Go.Id/Index.Php/Chome/Profil/95b68281-B56b-4097-Bc20-Ec090972d08c>.
- Dini Nisa, A., & Setiyawati, D. (2019). *A Systematic Review of Digital Literacy Training for High School Students*.
- Guruh, M., Gunawan, H., Isnaeni, D. P., Tilova, N., & Marlinah, H. (2020). *Hal (1-xx) @Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang 53* (Vol. 1, Issue 1).
- Hadjira, S., Anggreyani, R., Rahmi, T. H., Fitria, F. N., Suranto, & Sutan, A. J. (2023). Social Media And Human Trafficking: Using Social Media In Education Of Human Trafficking Case Study On Operation Underground Railroads (Ours). *E3S Web of Conferences*, 440. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344003008>
- Harmoko, D. D. (2021). Digital Literacy As A Solution To Improve The Quality Of Indonesia's Human Resources. *Research and Development Journal of Education*, 7(2), 413. <https://doi.org/10.30998/rdje.v7i2.10569>
- Ibad, M., & Juli Nurani. (2023). Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 12 issue 1, 21–36. <https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i1.153>
- Kharis Almasyhari, A., Priatna Sari, Y., Sukesti, F., Studi Akuntansi Universitas Muhamadiyah Semarang, P., Studi Akuntansi, P., & Harapan Bersama, P. (2022). Edukasi Literasi Digital: Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Perlindungan Data Pribadi dan Kaitannya Terhadap Financial Technology. In *Jurnal Abdimas PHB* (Vol. 5, Issue 3).
- Muhammad, R. (2021). Konseling Human Trafficking Di Sambas. In *JPdK* (Vol. 3).
- Nurhaipah, T., & Erdiyanti, Y. P. (2020). Literasi Media Online Pada Siswa Ma An-Nawawiyah Majalengka. *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 222–231. <https://doi.org/10.31949/jb.v1i3.320>
- Pratamawaty, B. B., Ariadne, E., Dewi, S., & Limilia, P. (2021). Sosialisasi Bahaya Media Sosial Sebagai Modus Perdagangan Orang pada Remaja di Jatinangor. 15(2), 76–92. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/index76>
- Rachmawati, I., Yuniarsih, R., Arisdiyoto, I., & Dina Amalia, A. (2025). Sosialisasi Dan Edukasi Siswa SMA Di Kabupaten Kubu Raya Mengenai Pencegahan Tindakan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Melalui Media Video Animasi. *Jurnal Akses Pengabdian Indonesia*, 10(2).
- Sari, M., Hidayani, N., & Fatmasari, E. (2024). *Dampak Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Bagi Siswa Sekolah Dasar* (Vol. 10, Issue 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.29408/didika.v10i1.25012>
- Sutirman, Kusuma, C. S. D., & Ramadhan, A. N. (2022). Youth Empowerment Through Digital Literacy Education. In *Proceedings of the 9th International Conference on Education Research, and Innovation (ICERI 2021)* (pp. 285–293). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-67-1_31
- Tria Sytrisna, & Ihsanuddin. (2024, July 15). 698 Orang Jadi Korban TPPO Sepanjang 2024, Terbanyak di Kepri dan Kaltara. *Kompas.Com*. https://nasional.kompas.com/read/2024/07/15/15560171/698-orang-jadi-korban-tpo-sepanjang-2024-terbanyak-di-kepri-dan-kaltara?lgm_method=google&google_btn=onetap
- Yulista, Y. (2021). *The Urgency of Digital Media Literacy Education to Increase Digital Proficiency Level* (Vol. 4, Issue 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/kjimp.v4i1.1779>

Format Sitasi: Poti, J., Arianto, B., Idiani, I., Ammelia, E., Gemilang, R. (2026). Literasi Media: Mengenal Modus TPPO dan Pencegahan di SMK 2 Kota Tanjungpinang. *Reswara. J. Pengabdi. Kpd. Masy.* 7(1): 192-203. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v7i1.7656>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution NonCommercialL ShareAlike 4.0 ([CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/))